

# Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Banyuasin

\*Andi Ricardy Purba  
Institut Teknologi dan Bisnis Nasional  
Banyuasin. Indonesia

[andiricardy1@gmail.com](mailto:andiricardy1@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 29/10/2022

Diterima : 9/11/2022

Dipublikasi : 9/11/2022

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi pada Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Banyuasin . Metode analisis data yang di gunakan adalah metode Deskriptif dimana data yang di peroleh melalui penelitian pada Kantor Bupati Banyuasin data hasil penelitian tersebut disusun, dikelompokkan, kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambar yang jelas mengenai fakta yang berlaku di lapangan. Kemudian metode Komperatif yakni menjelaskan secara detail tentang bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Banyuasin. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas rata-rata 100% dan rasio efisiensi 4,6% artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin selama periode penelitian (2016-2021) baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami peningkatan kinerja.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, Kinerja

## I. PENDAHULUAN

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variable lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sujarweni, 2015). Era otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan (Marihot, 2013)

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil.

(Rondonuwu et al, 2015) menyatakan bahwa kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim and Kusufi, 2016). Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah dapat digunakan sebagai instrumen untuk membuat peraturan dalam pembangunan daerah sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah wajib untuk diberikan setiap tahunnya (Lucky, 2013)

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah.

Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya menyebabkan pemerintah daerah mampu memenuhi segala kebutuhan daerahnya dan memberikan indikasi bahwa keuangan daerah telah mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Pemerintah pada suatu daerah sebagai pihak yang berperan dalam mengelola keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan agar dapat meminimalkan terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan mengetahui kinerja dalam mengelola keuangan daerahnya yang dinilai dengan menggunakan rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2015-2020

## II. STUDI LITERATUR

### Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, antara lain:

(Darwanis and Saputra, 2014) mengemukakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya

(Bahrun Assidigi, 2014) Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien.

(Gusti Made Ayu Aprilianda, 2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara parsial pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan retribusi daerah berpengaruh negative terhadap desentralisasi fiskal. Dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang paling dominan mempengaruhi kinerja keuangan

### Pengertian Kinerja Keuangan

kinerja keuangan seseorang atau sekelompok orang, perusahaan dapat mengetahui keuntungan yang didapat sudah mencapai tingkat tinggi atau belum. Apabila hasil dari kinerja keuangan tersebut baik maka laba yang ada dalam suatu perusahaan mengalami kenaikan, sebaliknya jika kinerja tidak baik maka akan mengalami penurunan laba di suatu perusahaan

Menurut (Hery, 2018) Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalakan sumber daya yang dimilikinya.

Sedangkan, menurut (Fahmi, 2014) Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal atau hasil kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan megandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil atau maju apabila perusahaan tersebut telah mengalami peningkatan baik dalam modal, skala usaha, hasil atau laba yang memadai, mencapai standar hingga tujuan yang telah ditetapkan

### **Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut (Mulyadi and wibowo, 2017) kinerja keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya dan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD dari daerahnya sendiri. Sehingga ciri utama daerah otonom adalah terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan dari daerahnya sendiri. Dengan demikian, otonomi daerah akan lebih mengarah pada hal kemandirian dalam bidang keuanagn yang biasanya diukur dengan derajat otonomi fiskal daerahnya.

### **Rasio Keuangan**

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersil), analisis rasio keuangan umumnya terdiri dari : 1. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera. 2. Rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur. 3. Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan. 4. Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, serta debt service coverage ratio (Halim and Kusufi, 2016).

### **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim and Kusufi, 2016). Menurut (Mardiasmo, 2018) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

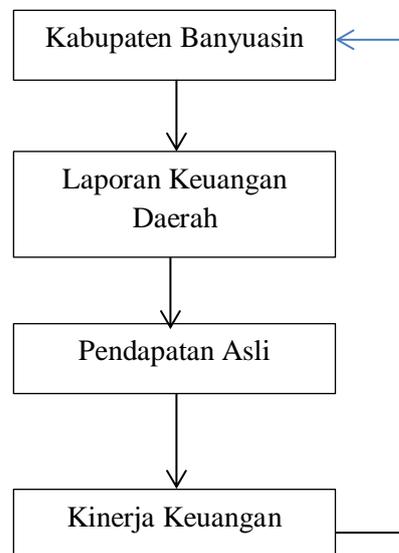
Sejalan dengan itu, menurut (Carunia, 2017) dalam bukunya yang berjudul Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranan Terhadap Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. pendapatan asli daerah ini juga harus dioptimalkan dan dikelola dengan baik

### Kerangka Pikir

Alur pemikiran tersebut sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

### Hipotesis

Untuk kepentingan penelitian ini, sesuai dengan tujuannya di ajukan hipotesis pengarah sebagai berikut Diduga pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### III. METODE

#### Metode Analisis

Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (descriptive kuantitative analysis method), yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan Rasio Keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan, dengan menghitung Rasio Keuangan dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun Anggaran 2014-2016 yang dilakukan dengan cara:

Menghitung Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan rasio-rasio berikut:

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah yang dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan pinjaman}}$$

#### Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

##### Rasio Efektifitas

Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

##### Rasio Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Penerimaan PAD}}$$

##### Rasio Aktifitas (Rasio Kekeragaman)

Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Perhitungan Rasio Keuangan Daerah pada Kabupaten Banyuasin

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan bersinambungan untuk menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintahan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, ada beberapa rasio yang dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan sebagai berikut:

##### Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern.

**Tabel 1 Rasio Keuangan Daerah**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman	Rasio kemandirian
2016	104218245	1515017783	6.879011334
2017	125984369	1438187888	8.759938117
2018	140602072	1449491756	9.700094631
2019	203473351	1570280389	12.9577719
2020	202577712	1399493327	14.47507524
2021	228233023	1533309194	14.8849967

Sumber : Data di Olah 2022

Pada tabel di atas, dapat dilihat dan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemkab Banyuasin dalam enam tahun terakhir (2016-2021). Pada periode tahun 2016 rasio kemandirian yang di hasilkan yaitu sebesar 6,88%. Pada periode tahun 2017 rasio kemandirian mengalami kenaikan sebesar 8,76%. Pada periode tahun 2018 rasio kemandirian sebesar 9,70%. Pada periode tahun 2019 rasio kemandirian mengalami kenaikan sebesar 12,96 %. Pada periode tahun 2020 rasio kemandirian sebesar 14,47%. Dan pada periode tahun 2021 rasio kemandirian mengalami kenaikan sebesar 14,88.

##### Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 2 Efektivitas dan Efisiensi

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target PAD Yang Berdasarkan Rill Daerah	Penerimaan Ditetapkan Potensi	Biaya Pemungutan PAD	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi
2016	633378158		660374622	140750701.8	95.911947	4.5
2017	597367181		699781880	129862430.7	85.364768	4.6
2018	619366765		727009350	131780162.8	85.193782	4.7
2019	983788568		780381970	218619681.8	126.06500	4.5
2020	813083212		644833980	169392335.8	126.09186	4.8
2021	813931927		703465670	173177005.7	115.70314	4.7

Sumber : Data di Olah 2022

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa rasio efektivitas pada Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi selama tahun anggaran 2016-2021. Pada tahun 2018 kemampuan Kabupaten Banyuasin dalam Merealisasikan Pendapatan yang telah di anggarakan mengalami penurunan/ hasil rasio efektivitas paling rendah selama 2016-2021. Tetapi tingkat Efektivitas pada Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016-2021 nilai efektivitasnya di atas 100% semua. Dan jika nilai efektivitas melebihi 100% maka merupakan kriteria yang sangat efektif.

#### Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

Tabel 3 Perhitungan Rasio Aktivitas

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Rasio Belanja Operasi	Rasio Modal	Belanja
2016	947229405	894741202	51.42478395		48.57521605
2017	1036943114	928802263	52.75063224		47.24936781
2018	1113985807	878054962	55.92183776		44.07816224
2019	1183571905	1237352830	48.88924831		51.11075169
2020	1338200141	1212504686	52.46393573		47.53606427
2021	1313174556	1019661742	56.29090038		43.70909966

Sumber : Data di Olah 2022

Dari tabel diatas terlihat sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Namun hal ini masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin karena terlihat rasio belanja modal dari tahun ke tahun menurun.

#### V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dalam merealisasikan

pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2016-2021 memiliki rasio efektifitas rata-rata 100% dan rasio efisiensi 4,5%. 2. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari 6,87% pada tahun 2016 menjadi 8,76% pada tahun 2017 dan 9,70% pada tahun 2018. Dimana terjadi peningkatan kemandirian daerah hingga pada tahun 2021. 3. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi selama periode penelitian (tahun 2016 sampai tahun 2021) sangat baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami peningkatan kinerja.

## VI. REFERENSI

- Abdul Halim , Muhammad Syam Kusufi. (2016), Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat ibadah. Jakarta : Salemba Empat, Hal 227
- Amrozi, Imam Akhmad. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur). Vol. I, No. 1. ISSN 2502-3764.
- Aprilianda, G. M. A. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Assidiqi, Bahrin. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Klaten 2008-2012. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Carunia Mulya Firdausy. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hery. (2018). Analisis Laporan Keuangan : Integrated and Comprehensive Edition. Cetakan Ketiga. PT. Jakarta : Gramedia
- Irham, Fahmi. (2014). Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal. Edisi Pertama. Jakarta.: Mitra Wacana Media
- Lucky, Dihan. (2013). Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4 (19): 7-17.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyani, Sri dan Hardiyanto Wibowo. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen*, 15 (1): 57-66.
- Rondonuwu, dkk (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 23-32.
- Siahaan, Marihot Pahala (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Wiratna, V Sujarweni.(2015)..Sistem Akuntansi. Yogyakarta : Pustaka Baru Press:Yogyakarta

